



LAPORAN KEGIATAN BPP BULAN MEI 2026



BPP MELAKUKAN RAPAT BERSAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI MENGENAI MASALAH YANG TERJADI DI PUNCAK, 04 MEI 2026

600 pengungsi di kabupaten puncak akibat peran antara KKB dan TNI 300 diantara mengalami sakit, mulai dari sakit malaria, sakit kulit luka tembak, 3 lainnya meninggal.

Ini juga disebabkan karena kurangnya air bersih dengan letak geografis, mereka berharap pemerintah dalam menyediakan pipa agar memudahkan mereka dalam kebutuhan sehari-hari.

Dinas kesehatan telah menyediakan ambulans juga obat-obatan, bahan makan namun tidak akan cukup

Maka dari itu kami berharap BPP dapat mendesak pemprov & dan pemda agar menyediakan kebutuhan air bersih dan makanan layak



ANGGOTA BPP PROVINSI PAPUA TENGAH MENGHADIRI BERSAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH MENGGELAR RAPAT KOORDINASI (RAKOR) BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2026 YANG BERLANGSUNG DI NABIRE PADA 5-7 MEI 2026. TEMA SINERGITAS PROGRAM, PENINGKATAN MUTU, PEMERATAAN AKSES, SERTA AKSELERASI DIGITALISASI PENDIDIKAN GUNA MENYAMAKAN PERSEPSI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN.



- ▶ Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) hadir membedah anggaran tahun 2026 dan memberikan peringatan keras bagi kabupaten yang belum mengalokasikan 30 persen dana tersebut untuk sektor pendidikan.
- ▶ Kedepannya, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten telah menyepakati pembentukan sekolah binaan di 10 titik per kabupaten yang akan mendapatkan intervensi khusus dari provinsi dengan mengerahkan tenaga guru MAPEGA secara maksimal.
- ▶ Sektor pendidikan vokasi juga diperkuat untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
- ▶ Provinsi akan mengambil peran pada pengembangan Akademi Komunitas, sementara tingkat kabupaten berfokus pada SMK dengan dukungan intervensi pembiayaan berbasis program dari provinsi.
- ▶ Model yang dikembangkan adalah SMK terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- ▶ “Pembiayaan ini bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk program. Misalnya SMK YPPK Wanggar didorong membangun pabrik pakan dan pupuk agar masyarakat bisa menjual bahan baku dan ekonomi berputar, sementara anak SMK praktik bekerja di sana. Lalu di SMK YPK Kalibobo diarahkan pada energi pertambangan untuk membangun listrik di kampung-kampung. Melalui PKBM kita tuntaskan akademiknya, sedangkan lewat SMK dan BLK kita tuntaskan keterampilannya,” tambahnya.

solusi:

tegas yang kami ambil adalah ketika kami memberikan dana BOS dan menemukan temuan data fiktif, provinsi akan merekomendasikan pencabutan NPSN sekolah tersebut. Kami juga mengundang yayasan seperti YPPK, YPK, YPPGI dan lainnya untuk menyampaikan solusi ini sebagai langkah ketegasan. Intinya, kebijakan Pak Gubernur adalah semua program pendidikan harus tersinkron dan terukur; ATS harus turun, mutu harus naik, dan semua anak harus sekolah,” pungkasnya.

**ANGGOTA BPP
MENGHADIRI FORUM
KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PAPUA
DI TIMIKA 11 S.D 12
PENGUATAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN OTONOMI
KHUSUS PAPUA DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN
PAPUA LEBIH
SEJATERAH.**



HASIL KESEPAKATAN KEGIATAN

Mendorong keberlanjutan program dan kegiatan strategis Pemerintah yang dilaksanakan di Tanah Papua sejak tahun 2024. Yakni, Trans Papua, Tol Udara, BBM 1 Harga dengan dukungan penerbangan khusus. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata prioritas masing-masing provinsi. Kawasan Industri Teluk Bintuni, kawasan industri pupuk Fafak, kawasan industri perikanan, Nabire, Biak, Timika dan Merauke, kawasan industri Timika, dan Kawasan Sentra Pertanian Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan, maupun berbagai kegiatan prioritas nasional lainnya di Tanah Papua dengan prinsip kekhususan.

mengawal secara serius penggunaan atas tambalan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran & mendorong percepatan penyelesaian pembangunan kawasan Inti Pusat dan Infrastruktur penunjang kantor pemerintahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dituntaskan paling lambat tahun 2028 dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Daerah Otonom Baru/Provinsi Baru.

mendorong terwujudnya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dari Kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas) dan Mitra Pembangunan Internasional dalam rangka penguatan pengelolaan Dana Otsus melalui revisi Undang-Undang Otsus Papua. Peraturan Pemerintah Nomor 106-107 Tahun 2021, dan PMK 33/2024. Salah satunya melalui pembentukan Tim Taskforce Tata Kelola Dana Otsus di setiap daerah guna memperkuat koordinasi Pusat Daerah.

mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sebagai implementasi rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui program Percepatan Pembangunan di Papua.

mengawal secara serius penggunaan atas tambalan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026.

mendorong terwujudnya Provinsi-Provinsi di Tanah Papua sebagai "Provinsi Olahraga" melalui dasar Hukum Perpres/Inpres guna membangun generasi muda sejak usia dini hingga tingkat prestasi.

memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se- Tanah Papua melalui, Legalitas Badan Hukum, Pembentukan Sekretariat Asosiasi dengan kolaborasi pembiayaan yang proporsional dari setiap pemerintah provinsi, yang memiliki tugas dan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah di enam provinsi, serta menunjuk Sekda masing-masing provinsi sebagai pejabat penghubung sekretariat Asosiasi Kepala Daerah se Tanah Papua.

membangun sinergitas kelembagaan antar Asosiasi Kepala Daerah se Tanah Papua, BP3OKP, MRP, DPRP dan Komite Eksekutif dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.

mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas strategis bersama (PPSB) menuju prioritas Papua sehat, cerdas dan produktif dengan fokus pada penyelesaian pendataan OAP, sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan bagi OAP, jaminan kesehatan OAP dan perlindungan sosial bagi OAP yang rentan.

kekayaan alam Papua tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil, tetapi menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Papua, melalui satu kesatuan ekonomi dan fiskal, yaitu pembagian DBH SDA dan diatur oleh Gubernur daerah penghasil untuk semua provinsi dengan mekanisme adil, satu untuk enam dan enam untuk satu. DAN pelaksanaan pertemuan paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pokja BPP Papua Produktif melaksanakan rapat koordinasi bersama Pemuda Tani Provinsi Papua Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan dan produktif di wilayah Papua Tengah. 15 Mei 2026

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- ▶ Meningkatkan peran aktif pemuda dalam sektor pertanian
- ▶ Mendorong inovasi dan kewirausahaan di bidang pertanian
- ▶ Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal daerah
- ▶ Mendukung program ketahanan pangan daerah
- ▶ Dalam rapat tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, antara lain:
 - ▶ Penguatan kelembagaan pemuda tani
 - ▶ Akses permodalan dan pendampingan usaha tani
 - ▶ Pemanfaatan teknologi pertanian sederhana
 - ▶ Distribusi hasil pertanian dan akses pasar
 - ▶ Sinkronisasi program pemerintah daerah dengan kebutuhan petani muda



Pokja Papua sehat & Papua Produktif melakukan Rapat bersama dinas perhubungan provinsi papua tengah (tentang kurangnya air bersih di daerah konflik khususnya kabupaten puncak) 19 Mei 2026

Kendala masyarakat:

- Banyak masyarakat masih **mengandalkan air hujan atau air tanah yang kualitasnya kurang baik**
- Akses air bersih sering terganggu karena **infrastruktur terbatas dan kondisi geografis pegunungan**
- Air dari pegunungan biasanya dialirkan dengan **pipa sederhana ke kampung-kampung**



Beberapa langkah yang akan dilakukan:

1. Kolaborasi lintas sektor

- Pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama:
 - **Dinas Kesehatan** → fokus pada kebutuhan air bersih untuk kesehatan masyarakat
 - **Perhubungan** → membantu distribusi logistik dan material (melalui bandara Sinak)

- Program pembangunan di Sinak juga mencakup **akses transportasi, gudang logistik, dan jalan** untuk mendukung distribusi air dan kebutuhan dasar

2. Program penyediaan air bersih

- Ada program seperti “**manunggal air**” yang sudah membantu masyarakat mendapatkan air bersih lebih dekat ke rumah
- TNI dan pemerintah sering bekerja sama:
 - Memperbaiki saluran air
 - Membuat jaringan pipa dari sumber air pegunungan
 - Membantu masyarakat secara gotong royong

3. Penanganan darurat & bantuan

- Saat terjadi kekeringan, pemerintah melalui Kemenhub dan instansi lain:
 - Mengirim **air mineral dan bantuan logistik lewat pesawat**



ANGGOTA POKJA PAPUA CERDAS MENGAHDIRI KEGIATAN PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM PENDIDIKAN, IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS), DAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN (BSAN) TAHUN 2026. 28 MEI 2026 DI JAYAPURA

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua telah melaksanakan Kegiatan Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Tahun 2026. Adapun hasil kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan SPM Pendidikan (ATS)	2. Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	3. Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman	4. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor
<p>Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tersusunnya dokumen perencanaan SPM pendidikan yang lebih terarah dan berbasis data Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan pendidikan dasar</p>	<p>Meningkatnya pemahaman satuan pendidikan terkait pentingnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif Tersusunnya langkah-langkah implementasi budaya sekolah aman dan nyaman Meningkatnya komitmen sekolah dalam pencegahan kekerasan dan perundungan Terbangunnya lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan peserta didik</p>	<p>Meningkatnya pemahaman satuan pendidikan terkait pentingnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif Tersusunnya langkah-langkah implementasi budaya sekolah aman dan nyaman Meningkatnya komitmen sekolah dalam pencegahan kekerasan dan perundungan Terbangunnya lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan peserta didik</p>	<p>Terbangunnya koordinasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya Adanya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program pendidikan Meningkatnya komitmen bersama dalam peningkatan mutu pendidikan di Papua</p>



Terima Kasih